



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 849/II/2015

II/FEBRUARI 2015



## KONTRAK FREEPORT HARUS PRO RAKYAT

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

# KONTRAK FREEPORT HARUS PRO RAKYAT



Pimpinan DPR konsultasi dengan Presiden dan Wakil Presiden

Pimpinan DPR menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menggelar rapat konsultasi. Diantaranya membahas masalah perpanjangan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Freeport Indonesia. DPR menilai perpanjangan kontrak dalam MoU Freeport itu menyalahi aturan yang ada, dan diharapkan Freeport dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Perpanjangan kontrak ini memang menyalahi aturan yang ada, maka kita sampaikan kepada Presiden. Sehingga

kita harapkan dapat segera di perbaiki,” harap Ketua DPR Setya Novanto, usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/02/15).

Menanggapi hal ini, tambah Politisi F-PG ini, pihaknya secepatnya akan membentuk Panitia Kerja. “Nanti kita di DPR akan membentuk panitia Freeport di Komisi VII untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi (rapat konsultasi dengan Presiden),” imbuhnya.

Berkaitan dengan smelter Freeport, Presiden Jokowi menyarankan agar

dibangun di Papua. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah diusulkan DPR. DPR berharap agar masalah ini segera dapat diselesaikan oleh Pemerintah.

“Karena Presiden juga menyampaikan bahwa apa yang diberikan oleh Freeport itu hanya Rp 6 triliun, sedangkan dari pihak pemerintah memberikan dana Otsus Papua hingga Rp 35 triliun. Ini harus dipikirkan jangka panjangnya, sebenarnya apa yang diperlukan oleh masyarakat Papua. Kontribusi Freeport betul-betul harus memberikan arti bagi Papua dan Bangsa Indonesia,” harap Politisi asal Dapil NTT I ini.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan berbagai hal yang harus diperhatikan Freeport, misalnya masalah limbah dan pembangunan tail yang sebaiknya dibangun di Papua. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang besar di Papua.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menambahkan, DPR meminta agar Freeport tidak melanjutkan rencananya membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Karena justru akan menimbulkan berbagai permasalahan baru.

“Saya bilang kalau di Gresik pasti banyak permasalahan, nanti Freeport sendiri merasa mendapatkan kurang penghargaan,” kata Politisi Demokrat ini.

Namun, tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah I ini, membangun smelter di Papua juga akan menemui masalah baru soal keterbatasan sumber daya listrik. Maka dari itu, Agus menyarankan perlunya pemikiran dan perencanaan lebih mendalam dan menyeluruh soal pembangunan smelter ini supaya tetap memberikan manfaat untuk rakyat Papua.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VII Tony Wardoyo mengungkapkan pihaknya akan segera membentuk panja terkait pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Komisi VII akan konsen dan mengawal pembangunan smelter tersebut.

“Kalau itu dibutuhkan, kami akan kawal dengan Panitia Kerja (Panja) mengenai operasi PT. Freeport Indonesia dengan pembangunan smelter di Papua. Pembangunan smelter Freeport hanya di Papua. Harus segera terlaksana. Hal ini sudah disepakati dalam

konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR,” kata Tony, di Gedung Nusantara I, Rabu (4/02/15).

Politisi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, jika smelter dibangun di Gresik, saat ini PT Smelting Gersik hanya mampu menyerap 30 persen dari hasil produksi konsentrat dari Freeport, sedangkan 70 persennya diekspor langsung. Ini tidak boleh dilakukan lagi, karena sudah diatur UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Disamping itu, tambah Tony, Kementerian PPN/Bappenas juga sudah me-

maparkan mengenai program pembangunan pembangkit listrik tahun 2015 di Papua yang berkapasitas 600 Megawatt, yang lokasinya tidak jauh dari wilayah tambang Freeport dan smelter yang akan dibangun. Selain itu, juga akan dibangun pabrik pupuk di Papua.

Dalam rapat konsultasi dengan Presiden dan Wapres, juga dibahas mengenai Perppu Pilkada, calon Kapolri, dan APBN-P 2015. Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah. (sf,as), foto : andri/parle/hr.

## Semua Anggota Dewan Diminta Konsen dan Bahas Anggaran

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Dewan mau reformasi APBN secara besar-besaran mulai dari perencanaan, bahkan ujungnya nanti soal belanja. Masukan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Untuk Kesejahteraan, platformnya sudah nampak, dan akan fokus pada APBN dan BMUN. Selanjutnya harus merumuskan apa saja scope yang menjadi konsen dan segera bagi tugas.

Demikian dikemukakan Fahri ketika menerima Koalisi Masyarakat Untuk Kesejahteraan antara lain dari Koalisi Anti Utang (KAU), Forum Indonesia Untuk Transparansi (FITRA), di ruang kerjanya Lantai IV Gedung Nusantara III Senayan, Rabu (4/2).

Menurutnya, dalam UU MD3 baru sengaja memangkas kewenangan Banggar dan diberikan kepada komisi-komisi. “Saya ingin semua anggota Komisi membahas dan konsen terhadap anggaran tidak hanya spesifik sektor masing-masing tetapi juga gambaran umum. Makanya, konsen ini harus dikampanyekan terus, dan mengajak publik untuk mengetahui bagaimana dana itu dialokasikan,” katanya.

Lebih lanjut Pimpinan DPR Koordinator Kesra ini mengatakan, nanti akan dirumuskan cara memaping atau memetakan satu wilayah persoalan, setelah betul-betul solid baru satu suara dengan jubar yang kuat.

“Mappingnya harus jelas sehingga ada advokasi. Setelah itu kemudian disusun sebagai temuan dan diajukan sebagai advokasi dan adjustment (pengaturan). Adjustment serius langsung masuk ke jantung persoalan. Kemungkinan juga bisa mengusulkan perubahan APBN,” kata Fahri.

Dani Setiawan dari KAU mengungkapkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan, dibentuk tahun 2011 dan mencoba membuat APBN alternatif sejak 2013 dan untuk APBN-P 2015 belum disusun. Sekarang sudah tahap finalisasi diharapkan dalam waktu segera diserahkan DPR.

Dijelaskan, hasil kajian atas APBN-P 2015 agak luput dari pandangan publik, dan anggaran ini sebagai batu ujian Pemerintah Jokowi untuk merealisasikan janji-janji selama kampanye lalu. Ternyata dalam pengamatannya, APBNP 2015 belum merealisasikan janji-janji tersebut terutama Trisakti



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima Koalisi Masyarakat Untuk Kesejahteraan

dan Nawa Cita.

Proses pembahasan yang singkat menjadikan hasilnya tidak berkualitas, padahal PR nya sangat banyak. Diantaranya soal penerimaan pajak, masalah penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sekitar 70 triliun. Banyak masalah terutama dalam peruntukannya, ternyata BUMN tidak mempersiapkan pemanfaatan secara baik.

Soal kebijakan subsidi, dikaitkan dengan keputusan MK yang melarang penetapan harga BBM sesuai mekanisme pasar, sedangkan keputusan yang diambil ditetapkan sesuai mekanisme pasar.

Selanjutnya terkait penerimaan negara yang dinaikkan, rakyat dieksploitasi kebijakan ini. Lalu PNBP titik kritisnya ada deviden yang diturunkan 9 T. Sebenarnya BUMN menjadi salah satu sumber penerimaan atau berpotensi sebagai penerimaan negara bukan pajak. Tapi BUMN yang jumlahnya cukup besar itu dan asetnya mencapai 4 ribu T lebih sementara penyertaan modalnya sebesar 700 T, tetapi kontribusi hanya sekitar 21,3 T pertahunnya.

Sekjen Fitra Yeni Sutjipto menuturkan, kajian Koalisi menyebutkan, Garuda diberi suntikan modal, tetapi dalam 3-4 tahun tidak memberikan deviden sama sekali. Tidak ada kajian yang mendasar terhadap hal ini sehingga bisa menjadi celah yang dimanfaatkan korporasi.

Khususnya APBN-P 2015 pada sektor penerimaan pajak, pada 2014 realisasi penerimaan pajak hanya 91%, artinya penerimaan pajak tersebut terendah dalam 25 tahun terakhir. Di APBN-P 2015 pemerintah dengan berani menarget-

kan akan ada kenaikan 104 T dari target 1.400 T. Artinya ini peningkatan yang ambisius karena dilihat dari kemampuan otoritas pajak hari ini, pesimis akan terealisasi.

Potensi wajib pajak juga sangat besar, sekarang WP perorangan dan badan sekitar 25 juta, bisa ditingkatkan 58-60 juta. "Ini ada gap WP yang sangat besar, kalau tidak ada upaya serius dan sungguh-sungguh, maka potensi itu akan menguap," ia menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Freeport Harus Konsisten Bangun Smelter



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Dubes AS

Negosiasi Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia dinilai berjalan baik. Negosiasi itu tentu harus memberi kontribusi yang nyata bagi rakyat Indonesia, terutama pembangunan di Papua. Negosiasi yang dilakukan itu menyangkut pembangunan smelter dan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai mendampingi Ketua DPR Setya Novanto menerima Dubes Amerika Serikat Robert Blake di DPR, mengatakan, Freeport harus berkomitmen dan konsisten membangun smelter di Papua sesuai harapan pemerintah dan DPR.

"Kebetulan dua hari yang lalu Pimpi-

nan DPR sudah menyampaikan hal itu kepada Presiden. Ini adalah tindak lanjut dari amanah teman-teman di Paripurna DPR yang menyampaikan bahwa pada prinsipnya Freeport harus tetap komitmen dan konsisten terhadap hal yang ada di MoU tentang pembangunan smelter yang diharapkan ada di Papua," ungkap Taufik, Rabu (3/2).

Robert Blake sendiri dalam keterangan persnya usai pertemuan, mengakui, negosiasi soal Freeport berjalan baik. Dia berharap, di tahun baru dengan Presiden baru dan Parlemen yang juga baru di Indonesia, bisa terjalin kerja sama lebih banyak lagi di berbagai

bidang untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Kedatangan Blake ini diterima langsung Ketua DPR Setya Novanto di ruang kerjanya.

Selain Taufik Kurniawan, hadir pula Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais juga ikut dalam pertemuan tersebut. Selain isu Freeport yang menjadi *trading topic*, dibahas pula isu-isu aktual seperti turunnya harga minyak dunia, pertumbuhan ekonomi global, politik mutakhir di Indonesia, hingga APBN-P 2015 yang sedang dibahas di DPR.

Pada bagian lain, Blake mengemukakan bahwa DPR memainkan peran sangat penting di Indonesia. Untuk itu, ia sangat mendukung atas rencana kunjungan Pimpinan DPR ke Amerika Serikat. Blake juga menyambut baik atas inisiatif membuka peluang kerja sama di segala bidang bagi kedua negara. Usai pertemuan tersebut, Blake langsung mengadakan pertemuan dengan Komisi I DPR.

Sementara itu, Nurhayati Assegaf menyampaikan, Indonesia dan Amerika sepakat membuka kerja sama bilateral di tingkat parlemen untuk menjembatani kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi dalam melakukan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Kuota Haji Indonesia Terbesar, Tapi Bargaining Rendah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sebetulnya kuota haji itu luas. Masalahnya mampu tidak, kita meningkatkan dan merebut kuota yang lebih banyak, akomodasi lebih dekat, transportasi yang lebih murah, layanan kesehatan dan makanan yang lebih baik itu bisa diusahakan. Namun karena uangnya tidak dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi kekuatan.

Hal itu dikatakannya saat mendampingi Ketua DPR menerima Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dipimpin Ketuanya Slamet Efendi Yusuf di Jakarta, Selasa (3/2).

"Kita sebagai pemilik kuota haji terbesar di dunia, tapi *bargainingnya* di pasar rendah. Karena uang tidak dipakai sumber *bargaining* di lapangan. Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih prima memerlukan uang yang lebih besar.



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Komisi Pengawas Haji Indonesia

Di sinilah fungsi tabung haji itu,” kata Fahri.

Menurut politisi PKS ini, persoalan haji di Indonesia sangat kompleks, di satu sisi penyelenggaraan haji lebih banyak dilakukan sektor swasta, dari masalah transportasi, akomodasi, katering, dan kesehatan. Di sisi lain konsumen haji Indonesia sangat spesifik, orang kampung kebanyakan dan usia lanjut, sehingga perlu proteksi, karena itu peran

## Kualitas Pelayanan Haji Harus Ditingkatkan

Tim Pengawas Haji DPR menilai secara umum pelaksanaan haji pada tahun 2014 lalu berjalan lancar, namun kualitas pelayanan haji harus terus ditingkatkan. DPR menyoroti beberapa masalah terkait dengan pelayanan, pemondokan di Mekah dan Madinah serta pelayanan transportasi di Mekah serta pelayanan katering dan kesehatan.

Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto saat menerima Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dipimpin Ketuaanya Slamet Efendi Yusuf di ruang kerjanya lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Selasa (3/2).

Ketua DPR yang didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua Komisi VIII Saleh P. Daulay serta Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid menambahkan, itulah beberapa hal yang perlu disampaikan dan direkomendasikan kepada pemerintah. Selain itu Setya juga mengatakan, perlunya dilakukan penataan untuk haji non kuota, sehingga tidak mengganggu pelayanan haji secara keseluruhan.

DPR juga menekankan, perlunya evaluasi terhadap pelayanan *catering*, di sisi lain juga perlu pemeriksaan yang lebih ketat terutama pada ibu hamil, orang tua atau yang sakit bawaan. “Inilah beberapa hal yang perlu disampaikan sehingga standar kualitas pelayanan harus bisa dicapai bagi kepentingan jemaah haji,” ia menambahkan.

Ketua DPR yang belum lama ini melakukan umroh juga menekankan, manajemen pengaturan haji perlu ditingkatkan, termasuk kekurangan personal serta pelayanan kebersihan kamar mandi. Untuk itu pada saat mengadakan kontrak dengan hotel, kelengkapan fasilitas perlu diperhatikan.

Menurut Ketua DPR, setiap tahun membentuk Tim Pengawas Haji dan sudah menjadi komitmen DPR untuk hati-

pemerintah masih sangat penting.

Terkait peran KPHI sebagai pengawas, dia menyatakan perlu diperkuat, cuma sekarang ada masalah karena dukungan pemerintah belum begitu kuat. Dewan kata Fahri, mau terus mendukung sehingga pengawasan teknis pelaksanaan haji bisa diperbaiki. Komisi ini harus punya nomenklatur sendiri, juga independen sehingga pemerintah yang diawasi betul-betul lebih konkrit.

Sehubungan rencana Komisi VIII akan merevisi UU Penyelenggaraan Haji dengan menggabung haji dan umroh, Pimpinan DPR mendukung saja termasuk masalah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang belum ada solusi. Pasalnya metode yang ada sekarang menyebabkan jarak antre terlalu panjang. Padahal seharusnya ada terobosan sehingga akses kepada percepatan kepesertaan haji ditingkatkan.

Saat ditanyakan apakah biaya transportasi haji bisa diturunkan mengingat harga minyak terus turun, kata Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini, juga harus dibahas lebih lanjut. “KPHI bisa memantau lebih teknis termasuk anatomi biaya haji yang sebetulnya bisa dibahas oleh Komisi VIII. Karena harga minyak terus turun, maka transportasi haji juga bisa diturunkan,” jelas Fahri menambahkan. (mp). foto: iwan armanias/parle/hr



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Fahri Hamzah menerima buku dari Ketua KPHI

hati seperti pengawasan katering dan transportasi. Karena sekarang KPK menyoroti masalah ini, meski DPR melakukan pengawasan, tetapi kalau ikut campur terlalu jauh, bisa menjadi salah.

Sementara itu Ketua KPHI Slamet Efendi Yusuf mengatakan, kedatangannya ke DPR dalam melaporkan hasil pengawasan kepada DPR dan Presiden setahun sekali. KPHI dilantik pada 2013, karena itu komisi ini baru melaksanakan tugasnya pada musim haji tahun 2013 dan 2014.

Namun sampai kini petugas sekretariat hanya diberikan seorang Kasubdit dan beberapa staf dari Dirjen PHU. Pada tahun lalu banyak kejadian yang memerlukan tindakan yang efektif agar pelaksanaan haji 2015 mendatang bisa lebih baik. Ada 9 sektor yang diawasi sejak dari transportasi, konsumsi, pemondokan, dan kesehatan serta organisasi kelembagaan.

“Karena aparat pendukung belum lengkap, maka pengawasan dilakukan oleh komisioner KPHI. Pengawasan kami ainul yakin, mata kami sendiri yang melihat sehingga

haqqul yakin dengan kebenaran pengawasan yang dilakukan,” katanya.

Menurut dia, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari masalah perencanaan sampai pengelolaan keuangan haji. Transportasi apakah perlu dipertahankan monopoli 2 maskapai penerbangan, atau dilepas sehingga tarif bisa lebih murah. Bila minyak dunia terus menurun, maka komponen biaya angkutan udara ini bisa dibicarakan kembali dengan perusahaan penerbangan.

Soal konsumsi, sejak tahun lalu diusulkan agar di Mekah jemaah haji diberikan konsumsi, namun hingga musim haji

terakhir belum dilaksanakan. “Pemerintah merencanakan akan diberikan dua kali dalam sehari, kami mengusulkan tiga kali,” ujarnya. Pasalnya pemondokan di Mekah berupa hotel-hotel dan melarang pedagang berjualan di sekeliling hotel.

Terkait transportasi di Mekah, dia mengusulkan ke depan perlu diintegrasikan dengan penginapan. Kami harapkan laporan yang kami sampai bisa dicermati oleh Komisi VIII karena tugas KPHI adalah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan haji tahun berikutnya bisa lebih baik. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Pimpinan DPR dan Empat Menko Bahas APBN-P 2015



Suasana pertemuan Pimpinan DPR RI dengan empat Menteri Koordinator

Pimpinan DPR mengundang empat Menteri Koordinator (Menko) untuk menyampaikan rencana anggaran dalam pembahasan APBN-P 2015. Pertemuan ini merupakan tradisi baru di DPR yang sebelumnya belum pernah terbangun. Beberapa anggota DPR mengapresiasi gagasan pertemuan yang bersifat silaturahmi tersebut.

Ketua DPR RI Setya Novanto memimpin langsung jalannya pertemuan. Semua Wakil Ketua DPR hadir, begitu pula pimpinan komisi dan fraksi. Secara berurutan empat Menko menyampaikan rencana usulan penambahan ang-

garan dalam APBN-P 2015, baik Menko Polhukam Tedjo Edy Pudjianto, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

“Pertemuan ini membahas program Menko untuk APBN-P 2015. Dalam waktu satu bulan harus selesai. Untuk itu, Menko harus lakukan koordinasi dengan kementerian lainnya menyangkut kesejahteraan rakyat,” kata Novanto di Gedung Nusantara IV DPR, Selasa (3/2).

Menko Polhukam menyampaikan

penambahan total anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp726,3 miliar. Menko Perekonomian menambah anggaran sebesar Rp326,6 miliar. Sementara Menko PMK menambah lagi anggarannya sebesar Rp196 miliar. Karena bersifat silaturahmi dan konsultatif, pertemuan ini tentu tidak mengeritisi lebih dalam usulan anggaran tersebut. Lebih detail usulan anggaran empat Menko itu, kata Novanto, akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Beberapa Pimpinan fraksi dan komisi memang memberi sedikit komentar dan catatan terhadap program kerja empat Menko. Umumnya menyetujui bahkan mengapresiasi program kerja empat Menko tersebut. Usulan anggarannya pun relatif kecil, karena tugasnya hanya koordinatif saja.

Usai pertemuan, Ketua DPR Setya Novanto dan Menko PMK Puan Maharani menyampaikan keterangan pers bersama yang intinya usulan anggaran ini harus segera dibahas, karena waktunya cukup sempit, yaitu satu bulan saja. Pertemuan ini juga sebenarnya menindaklanjuti pertemuan konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden di Istana, Senin (2/2) kemarin. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Masalah Merpati

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said dan Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilang menerima Delegasi Forum Pegawai Merpati, di lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (2/2) siang.

Kedatangannya dalam rangka audiensi terkait nasib karyawan PT Merpati yang sekarang ini terkatung-katung. Kalau diberhentikan, ada pesangonnya, kalau bekerja harus ada gajinya. “Ini sudah 14 bulan, mereka tidak gaji, sedangkan perusahaannya dalam kondisi kolaps,” kata

Agus Hermanto sesuai pertemuan.

Masalah ini, kata Pimpinan DPR Koordinator Industri dan Pembangunan (Inbang), harus segera ditangani oleh Pemerintah. Pasalnya Merpati adalah penerbangan perintis, sehingga memang tidak mendapatkan provit yang tinggi. Jangan sampai masalah luar (*outsanding*) lebih tinggi dari asetnya. Hutangnya dibanding asetnya lebih besar hutang dan ini sedang dibicarakan secara khusus di Komisi VI dengan Kementerian BUMN. Sedangkan masalah gaji dan dan kesejahteraan sedang dibahas Komisi IX dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Dibalik itu, lanjut Agus, karena Merpati sebagai penerbangan perintis, kita harus mempunyai keberpihakan, sebagai maskapai penerbangan nasional di Komisi V dibahas dan diharapkan bisa dihidupkan kembali. Apalagi dari karyawan Merpati Papua, mengatakan bahwa begitu pentingnya Merpati untuk Papua sehingga layak untuk dipertahankan.

Menurutnya, sekarang memang ada permasalahan dan kedatangan para karyawan Merpati ini wajib hukumnya bagi DPR untuk memperjuangkan dan diselesaikan melalui Komisi-komisi DPR. Namun kelihatannya akan sulit di komisi masing-masing, karena itu akan dibahas melalui Rapat Gabungan Komisi sehingga penyelesaiannya lebih komprehensif.

Sekjen Forum Pegawai Merpati Eri Wardana mengatakan, kedatangannya ke DPR intinya meminta dukungan untuk menanyakan kepada Pemerintah nasib karyawan dan nasib Merpati. Hingga sekarang, pemerintah belum memutuskan

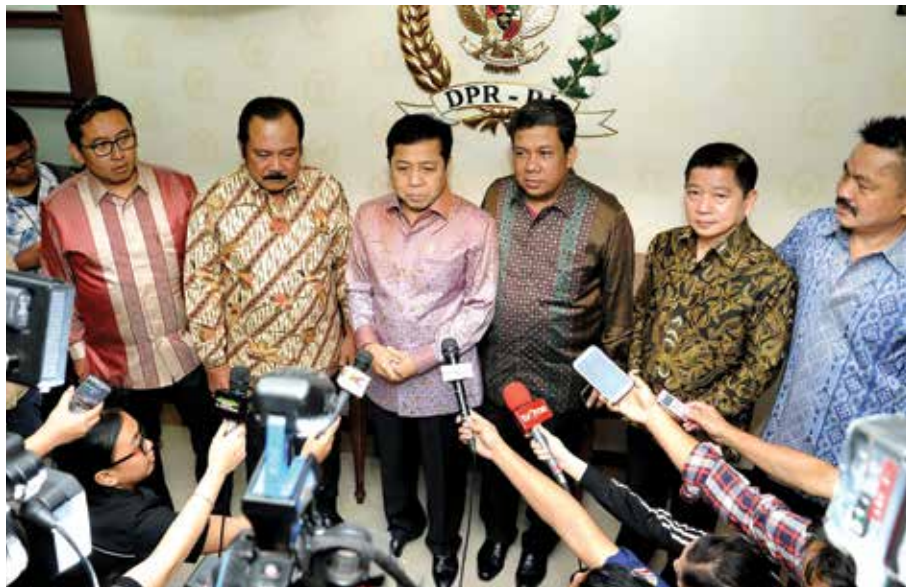


Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi Pimpinan Komisi V menerima Delegasi Forum Pegawai Merpati

apakah Merpati dihidupkan atau dimatikan. “Yang ada pembiaran. Sejak Nopember 2013 pemerintah sudah membahas, tapi solusinya tidak pernah ada,” tegas dia.

Yang ada malah dari Panja Merpati Komisi VI DPR. Tanggal 2 Juli 2014 dikeluarkan rekomendasi, tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Jadi pembiaran ini dilakukan oleh Kabinet yang lalu hingga sekarang. “Sejak Desember 2013 hingga Februari ini hak-hak kami ditiadakan. Sudah 14 bulan tidak digaji,” katanya dengan menambahkan, mayoritas karyawan pasrah jika Merpati ditutup, yang penting hak-haknya dibayar. (mp)/  
foto:iwan armanias/parle/iw.

## DPR Tetap Dukung KPK dan Polri



Pimpinan DPR RI usai menerima Wantimpres

Pimpinan DPR mengharapkan KPK dan Polri tetap bisa berjalan seiring sejalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Intinya Dewan mendukung KPK maupun Polri, dengan harapan kedua institusi tersebut bisa melaksanakan tugasnya dan berjalan dengan baik.

Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto sesuai menerima Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung DPR, Senin (2/2). Ketua DPR dalam kesempatan ini didampingi para Wakil Ketua Taufik Kurniawan, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah. Dari Wantimpres hadir Su-

bagyo HS, Suharso Monoarfa dan Rusdi Kirana.

Seusai pertemuan Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pihaknya mendapat masukan-masukan yang sangat berharga, khususnya masalah polri dan KPK. Sementara Subagyo HS mengatakan, intinya bagaimana agar dalam memberikan nasehat kepada Presiden menghasilkan keputusan terbaik untuk kita semua.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, kedatangan Wantimpres ke DPR sedang mencari jalan untuk memberikan masukan dalam posisi sebagai Dewan Pertimbangan. Bagaimana celah terbaik bagi Presiden dalam mengambil keputusan setelah keputusan persidangan pra peradilan. “Banyak yang didiskusikan, bagaimana Wantimpres nanti memberi masukan. Kita persilahkan karena Wantimpres adalah aparat yang ada di sekitar Presiden,” jelasnya.

Menurut Fahri, Dewan hanya bisa memberikan catatan-catatan hukum atas semua kasus yang ada. Masukan yang diberikan karena ada UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa

Kapolri harus dilantik setelah 20 hari setelah persetujuan Dewan. Dan 20 hari setelah mengecek file DPR, surat persetujuan dikirim tanggal 15 Januari,

maka 20 hari jatuh pada tanggal 4 Februari. “Apa akibat hukum jika sampai tanggal 4 Februari belum ada keputusan Presiden, ini yang banyak didiskusi-

kan antara Pimpinan Dewan dengan Wantimpres,” ujar Fahri Hamzah. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Ketua DPR Berharap Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi

Ketua DPR RI, Setya Novanto berharap agar dibawah kepemimpinan Raja Arab Saudi yang baru dapat lebih meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi, meskipun saat ini hubungan kedua Negara terbilang sudah cukup baik.

Hal itu disampaikannya saat menerima Delegasi Majelis Syuro Parlemen Arab Saudi, Senin (2/2) di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta.

Politisi dari Dapil NTT II ini menjelaskan, hubungan yang dimaksud diantaranya terkait peningkatkan kuota calon jemaah haji asal Indonesia. Karena sebagaimana diketahui jumlah jemaah haji Indonesia saat ini bisa dikatakan yang terbesar dari Negara-negara lainnya. Semoga dengan adanya perluasan atau pembangunan Masjidil Haram akan meningkat pula jumlah atau kuota yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia.

Novanto juga berharap agar Arab Saudi dapat membantu berbagai permasalahan yang dialami oleh TKI (tenaga kerja Indonesia) yang berada di Arab Saudi, mengingat jumlah TKI di Arab Saudi jumlahnya sangat banyak.

Pada kesempatan itu, Ketua DPR RI mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz 23 Januari 2015 kemarin. “Saya mengucapkan belasungkawa atas wafatnya yang mulia Abdullah bin Abdulaziz beberapa waktu lalu semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya. Saya juga berharap Arab Saudi dibawah Pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dapat lebih berkembang,” kata Setya Novanto.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Delegasi Majelis Syuro Parlemen Arab Saudi, Abdul Rahman Bin Ahmed Haeijan



Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima Delegasi Majelis Syuro Parlemen Arab Saudi

mengatakan bahwa dengan perluasan Masjidil Haram sudah pasti akan mempengaruhi kuota yang akan diberikan pada calon jemaah haji Indonesia. Terkait dengan TKI Indonesia, pihaknya akan berusaha menjembatani permasalahan yang terjadi pada TKI di Arab Saudi.

Tidak lupa pada kesempatan itu, Abdul Rahman sangat mengapresiasi sambutan dari pimpinan dan anggota DPR RI terhadap delegasinya. Ia berharap ke depan parlemen Indonesia dapat berbalas kunjungan ke negara yang kaya akan tambang minyaknya ini. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## DPR Dorong Kerja Sama Industri dengan Meksiko

Teknologi industri di Meksiko termasuk maju. Dan salah satu yang terkenal adalah industri perak. Indonesia perlu belajar dan menggali alih teknologi dengan Meksiko. Banyak peluang kerja sama yang bisa dibangun dengan Meksiko.

Demikian Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyampaikan hal tersebut kepada pers usai mendampingi Ketua DPR RI menerima kunjungan kehormat



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

matan Dubes Meksiko untuk Indonesia Melba Pria di DPR Senin (3/2). Selain industri perak, teknologi alutsista dan pertambangan lainnya juga cukup maju di Meksiko. Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi kemajuan industri dan teknologi Meksiko.

DPR mendorong kedua negara meningkatkan kerja sama industrinya. Peluang kerja sama industri ini membuka peluang besar bagi Indonesia



untuk meningkatkan kerja sama perdagangan. Selama ini nilai perdagangan Indonesia-Meksiko berkisar 1,2 miliar USD. Agus berharap, nilai perdagangan Indonesia-Meksiko perlu ditingkatkan terus agar saling menguntungkan kedua negara.

Di bidang kerja sama lainnya, seperti pendidikan, pariwisata, politik, dan keamanan masih terus terbuka untuk dibangun. Angka kunjungan wisata kedua negara juga belum terlalu tinggi. Lewat pertemuan dengan Dubes Meksiko itu, banyak kepentingan nasional

yang bisa disampaikan. Dan Dubes Meksiko juga sangat mengapresiasi peran Indonesia sebagai negara yang sangat bersahabat dengan Meksiko. (mh,hf)  
foto: iwan armanias/parle/iv.

## Pleno Baleg Sepakat Revisi UU Pilkada Masuk Prolegnas

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dengan Komisi II DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi UU Pilkada dan RUU tentang Revisi UU Pemda masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Rapat Pleno Baleg yang dipimpin Ketua Baleg Sareh Wiyono juga sepakat membentuk Panja Harmonisasi RUU Revisi UU Pilkada dan UU Pemda.

“Namun kami mengharapkan Komisi II segera menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat antar Fraksi-fraksi di Komisi II terhadap beberapa pasal yang akan direvisi,” kata Sareh di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman (sebagai pengusul kedua RUU tersebut) dalam penjelasannya menyatakan bahwa perlu ada penegasan di dalam pelaksanaan Pilkada, agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru.

Rambe menjelaskan bahwa Revisi UU Pilkada dimaksudkan untuk menata pelaksanaan Pilkada secara menyeluruh dan matang.

Rambe berharap Rapat Paripurna Senin (9/2/2015) dapat menyetujui RUU Revisi UU Pilkada dan RUU Revisi UU Pemda menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Setelah mendengarkan penjelasan Ketua Komisi II, Anggota Baleg Arif Wibowo meminta semua yang menjadi catatan saat penetapan Perppu Pilkada dan Perppu Pemda



Ketua Baleg Sareh Wiyono

menjadi UU dimasukkan dalam draft kedua RUU Revisi tersebut.

Anggota Baleg, Abdul Malik Haramain setuju kedua RUU tersebut menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI, namun ia minta ada penegasan pelaksanaan Pilkada di masa peralihan.

Sementara, Siti Masrifah mengusulkan penataan secara komprehensif sebagaimana prosedur pembahasan suatu RUU dalam melakukan revisi terhadap kedua UU ini. (sc)

foto: naefurodji/parle/hr

## Penutupan Konter Tiket Bandara Rugikan Masyarakat dan Operator

Komisi V DPR RI menyesalkan kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang menutup konter tiket di bandara mulai 15 Februari mendatang. Selain merugikan penumpang dan operator, kebijakan itu juga bertentangan dengan UU Penerbangan.

“Kami menghargai upaya Menhub untuk menata dunia penerbangan kita. Tapi jangan mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen dan operator. Apalagi sampai menabrak UU Penerbangan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia kepada Parlemen, Kamis, (5/2)

Berdasarkan UU No.1/2009 tentang Penerbangan, lanjut Yudi, pembukaan konter tiket di bandara sangat dimungkinkan untuk kelancaran kegiatan usaha angkutan udara, sebagaimana diatur dalam Dalam pasal 131 itu disebutkan bahwa untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.

“Adapun kegiatan usaha penunjang angkutan udara adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui komputer

(computerized reservation system), pemasaran, penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), dan pelayanan di darat untuk penerbangan,” jelasnya.

Disisi lain, kata Yudi, sesuai dengan pasal 195 UU Penerbangan juga menetapkan fungsi bandara sebagai tempat perusahaan (bisnis) selain sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan. “Salah satu peran bandara adalah sebagai pintu gerbang perekonomian. Itu diatur dalam pasal 194-195. Dengan demikian, jelas sekali bahwa berbisnis di bandara termasuk membuka konter



Suasana rapat Komisi V DPR RI

tiket tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Yudi mempertanyakan alasan penutupan itu karena adanya kontes di bandara tentunya dapat memudahkan calon penumpang dan menggerakkan perekonomian. “Kalau alasan penutupan kontes tiket di Bandara untuk mengurangi percaloan, sangat tidak beralasan. Percaloan dapat

dihapuskan jika ada pengawasan ketat dan tindakan tegas dari penyelenggara bandara dan Otoritas Bandar Udara sebagai lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, Bukan dengan me-

nutup kontes,” kata Yudi.

Yudi menilai penutupan kontes tiket justru akan berpengaruh pada penurunan pelayanan di bandara karena calon penumpang tidak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan tiket secara mendadak/*go show*.

Disisi lain, percaloan akan semakin marak karena tiket yang tidak Karena itu, Yudi meminta Menhub untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

Menurut Yudi, untuk membenahi dunia penerbangan Indonesia saat ini adalah menyelesaikan berbagai catatan yang diberikan ICAO (*International Civil Aviation Organization*) khususnya di bidang kelembagaan dan regulasi.

“Menhub punya target ambisius di bidang penerbangan yaitu menaikkan kategori penerbangan kita dari kategori 2 menjadi kategori 1. Untuk bisa mendapatkan predikat itu, maka 600 catatan ICAO harus ditindaklanjuti dan dibenahi. Jangan membenahi yang sudah benar. Malah bikin susah dan merugikan masyarakat dan operator,” kata Yudi. (Si) foto: rizka/parle/hr

## KBRI Harus Panggil Perusahaan IRobot



Anggota Komisi I Ahmad Zainuddin

Iklan sebuah perusahaan asing di Malaysia yang menyudutkan pembantu rumah tangga asal Indonesia dinilai sangat merendahkan martabat WNI di luar negeri. Perwakilan RI di Malaysia harus bersikap tegas salah satunya dengan memanggil perusahaan tersebut.

“Jelas-jelas kalau lihat *bannernya*, itu sangat merendahkan WNI kita di Malaysia. Masa lebih bermartabat robot. Dubes RI di Kuala Lumpur sebaiknya panggil perusahaan itu,” ujar Anggota Komisi I Ahmad Zainuddin dalam siaran persnya, Rabu Sore, (4/2).

Zainuddin mengatakan, KBRI di Kuala

Lumpur sebaiknya meminta penjelasan dari perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tentang maksud dari iklannya. Kalau perlu, lanjut dia, bukan hanya menyembunyikan *bannernya*, tapi menarik semua bentuk iklannya tentang IRobot.

Perusahaan tersebut, lanjut Zainuddin, seharusnya memahami psikologi WNI yang berada di Malaysia. Ada lebih dari 2 juta WNI yang mencari penghidupan di Malaysia, dan sebagian besarnya bekerja di sektor informal. Iklan itu bisa membuat hubungan RI-Malaysia memanas kembali, karena iklan tersebut akan disalahpahami banyak orang.

“Iklannya memang sangat merendahkan. Bagaimana kalau WNI kita yang bekerja di sana lalu tersinggung dengan iklan itu?” ucapnya.

Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, kasus iklan IRobot tersebut bisa menjadi cambuk dan pelajaran bagi pemerintah RI. Iklan itu menunjukkan soal sisi pandang pihak asing terhadap keberadaan mayoritas WNI di Malaysia. Pemerintah harus melakukan program perbaikan dan peningkatan kualitas buruh migran Indonesia yang akan

bekerja di luar negeri.

“Contohnya Filipina, tetangga dekat Indonesia. Kualitas buruh migran mereka di Malaysia lebih baik dari Indonesia. Salah satunya karena pekerja mereka bisa berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang jadi PRT untuk kalangan menengah dan elit Malaysia,” jelasnya.

Sebuah iklan produk elektronik di Malaysia memuat pesan yang cenderung merendahkan WNI asal Indonesia. Pesan dalam produk itu mengajak konsumen memecat Pembantu Rumah Tangga (PRT) asal Indonesia dan menggantikannya dengan robot.

Dalam website IRobot, diketahui kantor pusat IRobot berada di Bredford, Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini juga memiliki kantor utama di beberapa negara semisal California, United Kingdom, China dan Hongkong. IRobot sendiri memiliki kantor cabang di Malaysia dan beberapa negara lainnya Asia Tenggara, kecuali Indonesia. IRobot pertama kali ditemukan pada tahun 1990 di Massachusetts Institute of Technology Roboticists. (spy) foto: andri/parle/hr

# Komisi IX DPR dan Kemenkes Sepakat Sinergikan Kemitraan

Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mensinergikan kemitraan yang lebih intensif untuk mewujudkan anggaran kesehatan 5% dari APBN sebagai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Hal tersebut merupakan satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Dalam agenda rapat yang membahas RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015 ini, Komisi IX dapat memahami Kemenkes mendapatkan APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 47.758.757.903.000,-.

“Sesuai Surat Menkes Nomor S-876/MK.02/2014, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 3.518.524.581.000,-



Wakil Ketua Komisi IX DPR Pius Lustrilanang

Sehingga RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp 51.277.282.484.000,-”, kata Pius.

Selain itu, ujar Pius, Komisi IX minta Kemenkes untuk membuat simulasi perluasan Penerima Bantuan Iuran

(PBI) pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pemisahan anggaran PBI dari anggaran Kemenkes.

“Simulasi disampaikan ke Komisi IX DPR sebelum Komisi IX melakukan pendalaman program dalam RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015 dengan para Eselon I,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menkes Nila Djuwita F. Moeloek menyampaikan RAPBN-P Kemenkes Tahun Anggaran 2015.

Nila menjelaskan penambahan anggaran Kemenkes sebesar Rp 3.518 Triliun diperuntukkan untuk perluasan PBI pada program KIS, pelayanan kesehatan rujukan (Supply Side), tambahan untuk Badan Layanan Umum (BLU), tambahan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tambahan pinjaman luar negeri untuk perpanjangan Loan KFW Rumah Sakit Hoesin Palembang. (sc) foto: naefurodji/parle

## DPR Dukung Pembentukan KASN di Daerah

Komisi II DPR memandang penting untuk memberikan dukungan terhadap penguatan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui pembentukan KASN di daerah dan penguatan kewenangan KASN dalam memastikan terwujudnya sistem merit pada semua instansi pemerintah pusat dan daerah.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Wahidin Halim, saat RDP dengan jajaran KASN di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Mujib Rohmat mempertanyakan, jika dikaitkan dengan KASN yang salah satu fungsi dan tugasnya dalam melakukan tugas adalah melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, bagaimana KASN mengawasi Aparatur

Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya luar biasa banyak.

“Jumlah Kabupaten Kota saja lebih dari 500, kemudian provinsi ada 34, nah sementara bapak (KASN-red) ada dipusat saja, barangkali misalnya apakah ada pikiran/ide bapak (KASN-red) untuk UU ASN direvisi agar dimasukkan keberadaan perwakilan-perwakilan KASN di daerah?” tanya Mujib.

Mujib mencontohkan, seperti lembaga Ombudsman RI yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, dimana perwakilan-perwakilan mereka ada di setiap daerah.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Yanuar Prihatin anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, menurutnya hambatan, kendala dan masalah-masalah ‘akut’ didalam tubuh birokrasi itu bukan persoalan sehari dua hari bisa diselesaikan, sementara posisi KASN hanya ditingkat pusat, sedangkan ma-



Wakil Ketua Komisi II DPR Wahidin Halim

salah didaerah luar biasa banyaknya.

“Jadi bagaimana dengan keterbatasan ini mampu menjangkau area yang cukup luas,” katanya.

Oleh karena itu, perlu ada political will dari Komisi II DPR untuk menyempurnakan UU ASN, “Jadi nanti KASN akan diberi ruang besar untuk melakukan apa yang dimaksud dengan mendorong reformasi birokrasi kedepan-

nya,” tegas Yanuar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KASN Sofyan Effendi mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Komisi II DPR untuk memperbaiki mutu dari ASN kita agar bisa menghadapi tantangan di masa depan.

Sofyan menjelaskan, bahwa KASN

memang akan mempunyai unit-unit di daerah dengan bekerja sama, pertama dengan Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan kemudian kedua, untuk petugasnya, KASN menggunakan kantor regional BKN yang ada 12 diseluruh Indonesia.

“Jadi disana nanti ada auditornya, pengawasnya, dimana yang kita ki-

rimkan dilengkapi juga dengan asisten-asisten komisioner, dimana diantara asisten itu ada pejabat setara dengan eselon I sehingga bisa melakukan tugas-tugas pengawasan yang cukup baik dan bisa berhubungan dengan para Gubernur, karena yang kita awasi adalah pejabat-pejabat senior,” jelas Sofyan. (nt) foto: rizka/parle

## DPR Minta Badan Karantina dan BPOM Cegah Apel Berbakteri



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

Komisi IV meminta Kepada Badan Karantina Hewan Tanaman dan Ikan Kementerian Pertanian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pencegahan, terkait beberapa laporan ditemukan apel Granny Smith dan Gala yang diduga mengandung bakteri *Listeria monocytogenes*. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi endemik bakteri sejenis yang bisa menular produk-produk lain ditanah air.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, ada 45.000 apel dari California AS, dan dari Perancis yang sejenis teridentifikasi mengandung bakteri yang membahayakan tubuh manusia. Dijelaskannya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa barang siapa mengedarkan, memasukkan, ada bahan tambahan atau bahan tertular yang akan menyebabkan terganggu-

nya keamanan pangan, maka itu ada sanksinya.

“Yang bisa menetralsir terhadap masuknya barang impor ada dua lembaga, yaitu Badan Karantina Hewan Tanaman dan Ikan Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ungkap Herman Khaeron, di Gedung Parlemen, Rabu (4/2).

Politisi Partai Demokrat ini, menjelaskan Badan Karantina mencegah di pintu masuk, dan Komisi IV sudah meminta Badan Karantina untuk menghentikan sementara untuk seluruh produk-produk yang terindikasi tertular ataupun bakteri yang membahayakan tubuh manusia.

“Kami meminta Badan Karantina, Hewan, Tumbuhan dan Ikan, Kementerian Pertanian untuk segera mengeluarkan Surat kepada suplayer atau importir yang memasukan apel tersebut

agar segera menyetop dan juga segera menarik produk itu,” tegasnya.

Karena terkait UU tentang Pangan, Komisi IV juga sudah meminta Badan POM khususnya pengawas, untuk segera melakukan investigasi bahkan penghentian sementara penjualan, dan meminta kepada para distributor untuk menarik produknya.

“Saya kira ancamannya sudah jelas dalam UU Pangan mengenai keamanan pangan, sehingga masyarakat kita terhindar dari tertularnya dan terjangkitnya tubuh oleh adanya bahan makanan yang mengandung bakteri tersebut,” katanya.

Menurutnya, lebih membahayakan lagi kalau bakteri tersebut kemudian berkembang menular kepada produk-produk lainnya di tanah air, arena bakteri ini juga cukup bandel, meski dengan suhu -5 derajat masih bisa berkembang. Apalagi bakteri ini akan sangat cepat berkembang jika ketemu dengan gula. Dia (bakteri) akan tumbuh berkembang sangat cepat, dan dapat menyebabkan kematian.

“Ini bisa menyebabkan kematian, jadi kalau apel di rujak, ketemu gula, kemudian berfermentasi terjadi sebuah pertumbuhan yang cepat, kemudian bakteri tersebut dikonsumsi oleh manusia juga bisa menyebabkan kematian,” ungkap Herman.

Ada dua institusi yang harus bekerja secara simultan dan memberikan tindakan tegas. “Ini dimaksudkan pencegahan oleh Badan Karantina dengan memberikan notifikasi supaya tidak terjadi endemik bakteri sejenis yang bisa menular produk-produk lain di tanah air,” tegasnya. (as) foto: rizka/parle



# Pemerintah Perlu Siapkan Anggaran Kerukunan Umat Beragama



Anggota Komisi VIII DPR Jallaludin Rakhmat

tidak tercantum dalam laporan Dirjen Bimas Kristen. Seolah-olah hal tersebut bukan sebuah hal yang penting. Sehingga hal itu juga tidak dianggarkan dalam program kerja tahun 2015 ini,” ujar Maman Imanul Haq.

Dari laporan tersebut, baik Maman maupun Jallaludin berharap agar pemerintah, para Dirjen Bimas Kementerian Agama untuk lebih memperhatikan masalah kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut menjadi salah satu program penting yang akan menunjang terlaksananya program-program pemerintah lainnya. Jika antar umat beragama selalu berkonflik, bagaimana bisa program-program pemerintah lainnya dapat dijalankan dengan baik. (Ayu) foto: andri/parle

Anggota Komisi VIII DPR RI, Jallaludin Rakhmat menyesalkan tidak adanya anggaran untuk pembinaan kerukunan antar umat beragama yang diajukan Dirjen Bimas Budha. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Seluruh Dirjen Kementerian Agama baru-baru ini.

“Saya melihat laporan dan program-program yang disusun Dirjen Bimas Budha sangat lengkap sampai mencantumkan berupa unit kendaraan bermotor dan fasilitas yang dimilikinya. Namun sayangnya, di laporan evaluasi pelaksanaan APBN 2014 dan paparan program kerja tahun 2015 tidak mencantumkan anggaran khusus untuk pembinaan kerukunan antar umat beragama,” ungkap Jallaludin.

Dilanjutkan Politisi dari Dapil Jawa barat II, padahal dalam laporannya itu juga diakui masih adanya ketidak harmonisan intern agama Budha yang

disebabkan oleh perbedaan sekte dan pemahaman ajaran agama Budha serta tata puja bakti. Dimana kesemua itu mempengaruhi kerukunan di antara umat.

Senada dengan Jallaludin Rakhmat, anggota Komisi VIII lainnya, Maman mengungkapkan kekecewaannya terhadap laporan para Dirjen yang sama sekali tidak mengakui adanya permasalahan terkait kerukunan hidup antar umat beragama. Sementara sebagaimana berita di media massa, tidak sedikit terjadi kericuhan atau permasalahan di masyarakat yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan umat beragama.

“Seperti kita ketahui bersama, tidak sedikit permasalahan sosial yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antar umat beragama, sebut saja penutupan gereja di Bekasi, kerusuhan di Poso, serta pembakaran masjid di sebuah daerah. Kenapa semua itu



Tim Kunlap BURT DPR RI dipimpin Agung Budi Santoso mengunjungi RS provider di Manado

Perusahaan BUMN Jasindo sebagai Badan Penyelenggara asuransi kesehatan bagi pejabat negara perlu menjalin kerja sama dengan rumah sakit provider di daerah. Kerja sama dengan rumah sakit seperti RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) diperlukan untuk mendukung kinerja anggota dewan yang bisa saja sakit saat melaksanakan tugas ke daerah.

“Pada daerah-daerah tertentu bisa jadi yang tersedia hanya RSUD sebagai provider, kita berharap Jasindo bisa menjalin kerja sama,” kata Ketua Tim Kunjungan Lapangan Badan Urusan Rumah Tangga - BURT DPR RI Agung Budi Santoso usai melakukan kunjungan ke rumah sakit provider di Manado, Sulut, Rabu (3/2/2015).

la mengingatkan peristiwa beberapa waktu lalu, ketika

## Jasindo Diminta Jangkau RSUD

salah seorang anggota dewan yang sedang bertugas di Riau mendapat serangan jantung. PT Askes yang saat itu menangani membuat keputusan cepat dengan membawa pasien ke Jakarta.

Sementara itu anggota BURT dari Fraksi PKB Syaiful Bahri Anshori mendukung langkah PT Jasindo untuk memperhatikan sebaran rumah sakit provider di seluruh Indonesia. “Apalagi aktivitas blusukan anggota dewan ke daerah terpencil cenderung meningkat,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim IV ini.

Dalam kunjungan ke Manado, sejumlah masukan berhasil diperoleh diantaranya tentang *data base* anggota dewan yang belum diterima rumah sakit provider yang dikunjungi yaitu RS. Siloam dan RS. Advent. Hal lain yang juga dikritisi adalah masalah koordinasi antara rumah sakit yang pada kondisi tertentu harus berhubungan dengan kantor pusat Jasindo di Jakarta.

BURT yang bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR perlu memastikan Jasindo dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional. Apalagi perusahaan BUMN ini baru pertama kali mendapat kepercayaan sebagai Badan Pelaksana asuransi kesehatan bagi pejabat negara.

(iky) foto: ical/parle

## DPR Desak Malaysia Minta Maaf

Terkait iklan yang menyudutkan harga diri pekerja Indonesia yang beredar di Malaysia, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi desak pemerintah Malaysia meminta maaf dan memperbaiki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

“Menurut kami hal ini tidak bisa dianggap enteng, karena sudah terjadi berulang-ulang,” kata Dede kepada media saat Konferensi Pers yang didampingi Anggota Komisi IX, Rabu (4/2) di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta.

Atas nama Komisi IX, Dede meminta pemerintah Malaysia untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi termasuk hal-hal yang bersifat ras baik dalam iklan maupun penayangan-penayangan lainnya, serta saling menghargai sebagai dua bangsa yang bermartabat.

Pada kesempatan tersebut, terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia, politisi Partai Demokrat ini meminta pemerintah/Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan proses penghentian pengiriman TKI ke Malaysia jika hal ini terap berlangsung.

Ia menghimbau Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi saat Konferensi Pers

KERJA memberikan perhatian yang cukup tegas kepada Pemerintah Malaysia agar negara jiran ini memberikan penghargaan kepada pekerja Indonesia di Malaysia. (sc)/  
foto:naefurodji/parle/iw.

## UU Hak Cipta Perlu Disosialisasikan

Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disahkan pada November 2014 lalu. Namun seperti halnya belum banyak masyarakat yang mengetahui UU ini, sehingga penghargaan kepada karya cipta dirasa masih kurang. Bahkan, pembajakan pun tak kunjung berhenti.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X Krisna Mukti, saat RDPU dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Wahana Musik Indonesia (WMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI).

“Bagaimana kita mengedukasi atau sosialisasi UU Hak Cipta ini kepada masyarakat. Karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan itu pembajakan itu terus terjadi. Kita semua harus membantu bagaimana menyampaikan UU Hak Cipta yang baru ini dengan bahasa



Anggota Komisi X DPR Krisna Mukti

yang sederhana dan tidak *njelimet*, jadi mereka bisa memahami dan menerima hal itu,” kata Krisna, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (2/02/15).

Sosialisasi itu, tambah Politisi F-PKB ini, termasuk kepada para pelaku industri perhotelan, restoran, *café*, dan

rumah karaoke, dan lainnya. Peralnya, para pelaku industri tersebut tidak paham, jika menggunakan karya cipta para musisi harus membayar royalti.

“Makanya itu kenapa rekan saya Inul Daratista itu sering kali rumah karaoeknya pasti digerebek polisi hanya gara-gara masalah royalti itu. Jadi kedepannya, jika UU ini disosialisasikna, kita semuanya sama-sama enak. Para pencipta lagu bisa mendapatkan haknya, penggunaanya juga dapat melanggar hak cipta tersebut,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat VII ini.

Sebelumnya, ASIRINDO menyatakan akan memberikan lisensi legal terhadap rumah karaoke di seluruh Indonesia. Diperkirakan, ada sekitar 2500 rumah karaoke, dan terdiri dari *family karaoke* dan *luxury karaoke*. ASIRINDO menargetkan pendapatan Rp100 miliar pada 2015 dari seluruh rumah karaoke sebagai pengguna hak cipta tersebut.

(sf,hi) foto: andri/parle/hr

## Komisi II DPR Kritisi Anggaran Tiga Mitra

Rapat Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN dan ORI merekomendasikan empat kesimpulan, pertama, Komisi II DPR dapat menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 dengan tingkat penyerapan masing-

masing adalah, Kementerian PAN dan RB dengan tingkat penyerapan sebesar 80 persen, BKN terserap sebesar 91,92 persen dan Ombudsman RI dengan tingkat penyerapan sebesar 94,17 persen.

Kedua, terhadap anggaran Kementerian PAN-RB, BKN dan ORI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang akan datang. Komisi II DPR juga meminta agar dilakukan koordinasi antar kementerian/LPNK agar terjadi keterpaduan program atau tumpang tindih anggaran.

Ketiga, terhadap usulan tambahan anggaran BKN sebesar Rp. 11.400.000.000,- dan ORI sebesar Rp. 185.793.487.600,-, Komisi II DPR dapat memahaminya dan akan membahasnya lebih lanjut dalam RDP yang akan datang.

Dan keempat, Komisi II DPR meminta kepada Kementerian PAN-RB dan BKN untuk lebih mengoptimalkan pengalokasian anggaran tahun 2015 bagi penanganan permasalahan Tenaga Honorer K2 yang ditargetkan dapat diselesaikan secara komprehensif paling lambat pada Desember tahun 2015. Komisi II DPR menugaskan kepada Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkan pengalokasian anggaran terkait penyelesaian permasalahan Tenaga Honorer K2 tersebut pada pembahasan di Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Kementerian PAN-RB. (nt) foto: rizka/parle/hr



Suasana Rapat Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN dan ORI

## Pemerintah Perlu Masukkan Anggaran Pengangkatan Honorer K2



Suasana Rapat Komisi II DPR dengan MenPANRB

DPR meminta pemerintah memasukkan anggaran pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari tenaga honorer K2 dalam RAPBN-P 2015 yang jumlahnya mencapai 420 ribu orang. Sebab, pengangkatan honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ternyata tidak dianggarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam RAPBN-P 2015.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy saat rapat kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Lukman Edy, sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. “Komisi II DPR RI mendesak agar komitmen menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS tergambar pada anggaran,” katanya.

Ia mengungkapkan dalam RAPBN-P 2015, pemerintah belum memasukkan anggaran untuk pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS. “Padahal sudah menjadi janji presiden dan Menteri PAN-RB, untuk menyelesaikan tenaga honorer K2 sebanyak 420 ribu orang,”

ujarnya.

Sementara itu, Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer K2 mengikuti tes menjadi PNS bagi yang tidak lulus.

“Menurut aturan, pengangkatan tenaga honorer K2 sudah selesai tahun 2014. Tapi kebijakan pemerintah melalui pendekatan kemanusiaan, mempertimbangkan masukan DPR RI (Komisi II DPR RI), maka diambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer K2 mengikuti tes,” kata Yuddy.

Terkait anggaran untuk pelaksanaan tes tenaga honorer K2, Yuddy menyebutkan, Badan Anggaran Komisi II DPR RI dan akan melakukan pertemuan guna membahas secara teknis. “Itu panitia banggar Komisi II DPR akan membahas dalam rapat tekni tanggal 7-9 Februari. Komisi II DPR RI akan alokasikan berapa,” katanya.

Ia menambahkan, pihak KemenPAN dan RB tidak bisa menghitung besaran anggaran untuk rekrutmen PNS dari tenaga honorer karena tidak terpusat disatu kementerian. “Soal kepegawaian tidak di KemenPAN-RB saja, tapi di kementerian lain dan juga terbagi-bagi di daerah-daerah,” ujarnya. (nt) foto: rizka/parle/hr

## Panja PMN Tetap Merujuk Pada Hasil Audit BPK

Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dibentuk Komisi VI DPR tetap menjadikan hasil audit BPK sebagai bahan rujukan utama dalam menilai rencana pengembangan bisnis di beberapa BUMN. Komisi VI sudah memetakan kinerja BUMN yang baik dan buruk.

Ditemui usai pertemuan Pimpinan DPR dengan empat Menko di Nusantara IV, Selasa (3/2), Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (Dapil Sum-sel I), mengungkapkan, banyak BUMN yang kini terus merugi. Untuk itu, PMN menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. "Kita melihat ada beberapa BUMN yang betul-betul kita anggap tidak akan mampu memutar kapital ini menjadi suatu upaya untuk menggerakkan pembangunan, karena kinerja keuangan dan kopersinya sendiri sudah sangat bermasalah," kata Hafisz.

Anggota F-PAN itu menuturkan, akan ada sepuluh rekomendasi yang



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

nanti akan dikeluarkan Komisi VI. Namun, ia belum bisa merinci rekomendasi itu lebih lanjut. Yang jelas, katanya, ada beberapa BUMN yang dipandang negatif dalam mencari keuntungan sepanjang 3-4 tahun terakhir. "Kita akan menandai merah untuk BUMN seperti itu," ungkap Hafisz.

Kerugian yang dialami beberapa BUMN tidak selamanya karena aksi korporasi, melainkan dipicu adanya larangan ekspor bahan baku mentah seperti yang dialami PT. Antam. Menurut Hafisz, PT. Antam termasuk yang layak mendapat PMN. Selain itu, ada PT. Krakatau Steel yang sudah tiga tahun merugi karena industri konstruksi dunia, memang, sedang menurun. Untuk itu, Krakatau Steel pantas mendapat PMN sekaligus untuk menjaga saham pemerintah agar tetap menjadi mayoritas.

Beberapa BUMN yang dinilai baik dari hasil pemaparan business planing dan laporan keuangannya, sambung Hafisz, adalah PT. Hutama Karya, PT. Waskita, dan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI). Ada PT. Angkasa Pura dan BUMN Perbankan yang juga dinilai baik. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Komisi VII Persoalkan Harga Premium dan Solar



Suasana Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM

Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi kembali mempersoalkan dasar penetapan harga premium Rp 6.600/liter dan solar Rp 6.400/liter.

"Dari mana dasar penetapan harga itu? Kok ini ada harga perolehan segala, ada margin tambahan 2% lagi. Kan sudah ada margin di harga perolehan, harga MOPS-nya (*Mean of*

*Plats Singapore*) berapa itu?" tegas Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin sore, (2/2).

Protes yang sama juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian. Ia mempersoalkan harga premium Rp 6.600/liter, sementara saat ini harga bensin RON 95 kelas pertamax plus di Singapura di bawah Rp 6.000/liter.

"Di Singapura saja sekarang bensin RON 95nya di bawah Rp 6.000/liter, kenapa tidak sesuai seperti patokan yang ada MOPS, sebenarnya premium itu di subsidi atau tidak," tegas Ramson.

Sementara pada Raker lanjutan Selasa (3/2) ini, Menteri ESDM Sudirman Said kembali dicecar terkait perhitungan penetapan harga Premium dan solar khususnya mengenai adanya tambahan biaya bagi Pertamina.

"Saya mempertanyakan tambahan biaya bagi Pertamina atas ganti rugi akibat turunnya harga minyak terhadap stok BBM yang dimiliki Pertamina, ini apa formula dan dasarnya," tanya Anggota Komisi VII DPR Endre Saifoel (Fraksi PAN) saat Raker tersebut.

Pada kesempatan itu, Saifoel menilai penetapan harga premium dan solar pemerintah memberikan biaya ganti rugi stok Rp. 350/liter itu sangat besar.





“Ini besar sekali darimana asalnya, biaya angkut sudah diberikan ke Pertamina Rp. 178/liter, biaya operasi depot Rp. 246/liter belum lagi *margin* usaha,”ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR Iskan Qolba Lubis (Fraksi PKS) mengaku heran terhadap perhitungan formula harga BBM yang banyak poin yang aneh-aneh. “Banyak perhitungan aneh, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), ini pajak orang yang punya mobil, harusnya di-

bebankan bagi yang punya, jangan dimasukkan kedalam komponen harga BBM,” tegasnya.

Dia menambahkan, Pertamina harus mencontoh Unilever, dimana harga sabun kepelosok bahkan sampai Papua harganya sama. “Mereka dalam manajemen distribusi sangat andal, pada kenyataannya harga BBM dipelosok jauh lebih mahal dari yang ditetapkan,” jelasnya. (Si) foto: andri/parle/hr

## Dewan Segera Tetapkan Prolegnas 2015-2019



Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo berbincang dengan Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 melalui Rapat Paripurna DPR pada Senin (9/2/2015) yang akan datang.

“Insyaallah pada Senin nanti DPR akan mengesahkan melalui Paripurna yaitu Prolegnas yang akan mulai dibahas DPR dalam masa Sidang ketiga nanti dengan target 150 Undang-Undang yang akan diundangkan selama lima tahun,” terang Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo kepada Parlemen di Gedung DPR, Jakarta, Kamis Sore (5/2/2015).

Ia menjelaskan bahwa RUU yang ditetapkan di Prolegnas adalah RUU yang merupakan inisiatif dari DPR, Fraksi-fraksi, DPD RI dan pemerintah serta termasuk juga dari masyarakat.

Semua usulan, inisiatif dan aspirasi dari semua pihak yang ditampung Baleg, jelas Firman, maka terakumulasi kurang lebih 311 RUU. Dari 311 RUU longlist ini, telah dibuat RUU shortlist menjadi kurang lebih 56 RUU.

“Jika dari 311 RUU itu kita akomodir semuanya itu tidak mungkin akan diselesaikan dalam waktu lima tahun, karena ada ketentuan yang mengatur didalam Tata Tertib DPR RI bahwa masing-masing Komisi itu setiap tahun minimal RUU

yang diundangkan hanya dua, ini juga termasuk masalah yang terkait dengan masalah target anggaran yang disediakan oleh pemerintah atau negara,” papar politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itulah, menurutnya, ia berinisiatif mengundang Pimpinan Komisi-komisi untuk melakukan konsolidasi internal untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas. Namun, tegasnya, skala prioritas itu harus didukung dengan naskah akademik dan draft serta persiapan renstranya.

Firman juga menginformasikan bahwa Kamis malam Baleg akan melakukan pembahasan dengan pemerintah dan DPD dimana akan dinetkan sebanyak kurang lebih 50 RUU untuk Prioritas Tahun 2015.

“Kalau 50 RUU ini tentunya kami meminta konfirmasi kepada teman-teman Komisi karena slot yang diberikan kepada Komisi itu satu tahun dua RUU, maka supaya tidak terjadi efek domino terhadap proses RUU ini tidak tercapai karena menentukan sekali pada tahun 2015 itu adalah RUU yang betul-betul sudah siap baik dengan naskah akademiknya dan draf RUU itu sendiri serta termasuk persiapan renstranya. Sehingga 2015 itu betul-betul pada masa Sidang ketiga nanti teman-teman sudah langsung bisa membahas RUU,” teranya.

Jika bisa terpenuhi, ujar Firman, maka efek domino akan menjadi baik sampai pada tahun 2019 itu 150 UU akan bisa tercapai.

Selanjutnya Firman menjelaskan, bahwa Baleg akan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Badan Legislasi. Ia juga akan mengusulkan kepada Bamus DPR, untuk menambah target pencapaian RUU menjadi UU, maka Baleg akan ikut membahas RUU minimum 2 RUU dan maksimum 3 RUU.

“Kalau itu semua bisa kita lakukan dan disepakati maka 150 RUU akan mudah tercapai secara maksimal dan optimal dan alhamdulillah teman-teman dari Komisi bersepakat untuk itu”, imbuhnya. (sc) foto: naefuroji/parle/hr

## DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Hak Cipta

DPR mendesak Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-undang No 28 Tahun 2014 ten-

tang Hak Cipta. Akibatnya, UU yang telah disahkan pada November 2014 lalu ini belum dapat diimplementasikan secara maksimal, akibat belum adanya

PP untuk menunjangnya, walaupun sudah ada Peraturan Menteri.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X Dadang Rusdiana di sela-sela RDPU

antara Komisi X dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Wahana Musik Indonesia (WMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI).

“Pemerintah terlambat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintahnya, padahal UU sudah disahkan, dan Peraturan Menteri sudah keluar. Hal ini membuat UU No 28/2014 tentang Hak Cipta ini menjadi tidak implementatif. Pembajakan masih marak dimana-mana,” tegas Dadang di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (2/02/15).

Politisi F-Hanura ini juga meminta PP itu dapat mengatur dengan tegas fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Padahal, LMKN ini memiliki tugas yang cukup berat, namun belum diperkuat oleh PP. Lembaga ini berfungsi mengkoordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh lembaga manajemen kolektif di bawahnya.

“LMKN harus kita beri kewenangan besar untuk mampu menindak dengan tegas. Proses pembajakan jelas merugikan negara, sementara LMKN ini fungsi dan kewenangannya belum diatur oleh PP dari UU 28/2014. Kita berharap, PP yang akan dibuat Pemerintah itu mempertegas otoritas kewenangan dari LMKN ini. Sehingga betul-betul bisa mengatasi pembajakan yang sekarang sedang marak,” tegas Dadang.

Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini



Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

optimis, jika pembajakan ini bisa diminimalisir, maka industri musik akan menjadi industri yang menggairahkan ke depannya. Bahkan, mungkin akan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto.

Senada dengan Dadang, Anggota Komisi X Anang Hermansyah juga mempertanyakan langkah Pemerintah yang belum mengeluarkan PP untuk LMKN. Walaupun LMKN sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), namun ia menilai belum terlalu kuat untuk menopang kewenangan LMKN.

“Bagaimana dengan PP-nya, apakah LMKN itu kuat dengan hanya Permen? Bagaimana LMKN itu menentukan sistem satu pintu besar ini mau seperti apa, dan bagaimana aturannya. Makanya, LMKN ini tugasnya memang

cukup luar biasa. LMKN harus diperkuat oleh PP,” tegas Anang.

Politisi F-PAN ini menaruh harapan besar terhadap kinerja LMKN ke depannya. Ia berharap, LMKN ini akan berfungsi sebagai legislator. Dengan posisi LMKN yang hanya masih ditopang Permen, LMKN dapat menentukan harga kepada user, besaran royalti kepada pencipta lagu, dan sistem terpadunya.

“LMKN ini adalah lembaga yang cukup ditunggu. Diharapkan, LMKN akan mengubah sistem industri musik Indonesia. Kalau ini dapat berjalan dengan baik, dapat banyak menyelamatkan keuangan negara dan kehidupan para pencipta musik” harap Politisi asal Dapil Jawa Timur IV ini.

LMKN dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 28 Tahun 2014. Dengan adanya LMKN dan UU tersebut, nantinya tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik, seperti kafe, tempat karaoke, dan pentas seni, harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.

Belum lama ini, 10 komisioner dilantik oleh Menkumham Yasonna Laoly, yang terdiri dari lima komisioner pencipta dan lima komisioner hak terkait. Lima komisioner pencipta adalah Rhoma Irama, James Freddy Sundah, Adi Adrian (Adi Kla Project), Imam Haryanto, dan Slamet Adriadhie. Sementara, komisioner hak terkait adalah Raden M Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo), Ebiet G Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, dan Handi Santoso. (sf), foto : andri/parle/hr.

## Pemerintah RI Didorong Bangun Perjanjian Ekstradisi dengan ASEAN

Rumitnya memulangkan koruptor seperti Djoko Tjandra dari Papua Nugini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia. Sudah saatnya pemerintah membuat perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, atau dalam kawasan Asia Tenggara.

“Dari 10 anggota ASEAN, pemerintah kita baru punya kerjasama ekstradisi dengan tiga negara, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Semestinya kita sudah harus punya perjanjian ekstradisi dengan seluruh negara ASEAN,” ujar Zainuddin di Jakarta, Senin (2/2).

Zainuddin menyambut baik langkah pemerintah membuat RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam dan Papua Nugini, yang kedua RUU tersebut telah



Suasana rapat Komisi I DPR dengan Menkumham



disetujui Komisi I untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan lebih lanjut. Dengan disahkannya perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini nantinya, Zainuddin berharap buronan koruptor seperti Djoko Tjandra bisa segera dipulangkan.

Menurutnya, perjanjian kerjasama ekstradisi dengan seluruh anggota ASEAN mutlak dilakukan Indonesia. Hal itu perlu agar kasus serupa seperti kaburnya Djoko Tjandra tidak terulang lagi. Apalagi Indonesia merupakan negara besar di kawasan yang berbatasan langsung baik darat maupun lautan dengan negara-negara ASEAN.

Perjanjian ekstradisi, lanjut Zainuddin, sejalan dengan visi pemerintah dalam penegakan hukum dan pengembalian aset-aset negara dari tangan koruptor. Masih tingginya indeks korupsi di Tanah Air ditambah dengan minimnya perjanjian ekstradisi dengan negara sahabat, akan menyulitkan pemerintah di kemudian hari jika harus mengejar koruptor yang kabur ke luar negeri.

Bukan hanya korupsi, menurut

Zainuddin, Indonesia juga menjadi wilayah potensial praktik kejahatan-kejahatan lintas batas (*transnational crimes*). Gagasan membentuk perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN lanjut Zainuddin, sebenarnya sudah ada sejak *Bali Concord I* atau *Declaration of ASEAN Concord* tahun 1976. Perjanjian itu menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN mengatasi kejahatan transnasional, termasuk korupsi yang masuk kategori *extraordinary crime*.

“Kerjasama perjanjian ekstradisi akan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan ASEAN makin kokoh,” ucapnya.

Dalam catatan Zainuddin, hingga saat ini Pemerintah RI baru memiliki perjanjian ekstradisi dengan tiga negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dengan diratifikasinya UU no 9 tahun 1974, Filipina diratifikasi dengan UU no 10 tahun 1976, dan Thailand diratifikasi dengan UU no 2 tahun 1978.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kerjasama ekstradisi dengan Australia

diratifikasi dengan UU no 8 tahun 1994, Hongkong diratifikasi dengan UU no 1 tahun 2001, Korea Selatan ditandatangani tahun 2001, dan India ditandatangani tanggal 27 April 2007.

Sebelumnya, pemerintah RI dan Papua Nugini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan perjanjian ekstradisi kedua negara. Nota yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin saat itu adalah bagian dari 11 nota kesepahaman RI-Papua Nugini. Perjanjian ekstradisi tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari proses pemulangan Djoko Tjandra yang berlarut-larut.

Djoko merupakan terdakwa kasus hak tagih Bank Bali 11 Januari 1999. Ia meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009. Hingga saat ini Djoko belum berhasil dipulangkan karena terganjal perjanjian ekstradisi. (spy), foto : andri/parole/hr.

## Komisi V DPR Setujui RAPBN-P 2015 KPUPR Rp. 118 Miliar



Raker Komisi V DPR dengan Menteri PUPR

Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) RAPBN-P 2015 sebesar Rp. 118 Miliar.

Demikian salah satu butir kesim-

pulan Raker Komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimujono, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohammad Said, di Gedung Nusantara, Senin malam, (2/2).

Raker tersebut berlangsung kurang lebih 6 jam dimulai dari jam 13.00 hingga berakhir pada pukul 19.00 WIB.

“Penambahan pagu anggaran tersebut terdiri dari Rp 84.9 Miliar APBN asli dan tambahan Rp 33.3 Miliar rupiah murni dan pinjaman utang luar negeri Rp 323 juta,” jelas Muhidin.

Pada kesempatan itu, Komisi V DPR memberikan catatan terhadap KPUPR. Pertama, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran untuk unit organisasi, fungsi, dan program masing-masing eselon I berdasarkan saran dan usulan dalam rapat.

Berikutnya, lanjut Muhidin, Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR untuk menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. “Ini juga termasuk rencana kebutuhan pembiayaan per sektor setiap tahun anggaran kepada Komisi V DPR,” paparnya. (Si), foto : riska arinindya/parole/hr.

# Setneg Diminta Segera Selesaikan Permasalahan Aset Negara



Ketua Komisi II DPR Rambe KamarulZaman saat memimpin rapat

Komisi II DPR meminta Kementerian Sekretariat Negara menyelesaikan permasalahan terkait aset negara yang dikelola kementerian tersebut agar bisa mengoptimalkan pendapatan negara.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat membacakan rekomendasi rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kementerian Sekretariat Negara di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2).

“Kami meminta Kementerian Sekretariat Negara segera menyelesaikan permasalahan aset negara yang dikelola kementerian tersebut,” kata Rambe Kamarul Zaman.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan, Komisi II DPR meminta Kementerian Sekretariat Negara berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, Rambe menekankan perlu pembicaraan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan aset negara sampai terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang aset negara.

“Kami meminta Kementerian Sekretariat Negara berkoordinasi dengan Kemenkeu. Perlu pembicaraan tersendiri sampai terbentuknya perundang-undangan tentang aset negara,” ujarnya.

Komisi II DPR juga meminta Kementerian Sekretariat Negara menjalankan dengan konsisten dan optimal semua catatan yang diberikan anggota Komisi II DPR terkait aset negara. Di samping itu, Komisi II DPR juga mendesak Kementerian Sekretariat Negara untuk merancang rumusan tentang administrasi tertib hukum aturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan tugas Kementerian Sekretariat Negara agar tidak bertentangan dan tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

“Misalnya, perpres agar tidak tumpang tindih dengan aturan di atasnya, dengan menggunakan teknologi informasi. Sinkronisasi itu sesuai dengan lingkup kewenangan Setneg,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rambe juga mengungkapkan bahwa Komisi II DPR dapat menerima realisasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara yang mencapai 85,23 persen dan penyerapannya. Namun, Komisi II DPR meminta Setneg mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam Raker dengan Komisi II DPR mengatakan, penerimaan negara bukan pajak yang dicapai kementeriaannya selama 2014 mencapai Rp 362,2 miliar.

“Target PNB 2014 senilai Rp 258,1 miliar dan realisasinya mencapai Rp 362,2 miliar,” katanya.

Sementara itu, menurut Pratikno, alokasi anggaran belanja Setneg pada 2014 senilai Rp 2,4 triliun dan realisasi mencapai Rp 2 triliun atau sebesar 85,23 persen. (nt), foto :

riska arinindya/parle/hr.

## Napi Jadi Bandar Narkoba Terkesan Pembiaran

Anggota Komisi III Wenny Haryanto mengaku tidak habis pikir bagaimana seorang narapidana narkoba, bahkan yang sedang menunggu vonis hukuman mati masih bisa mengendalikan bisnis obat terlarang dari balik jeruji di Lembaga Pemasyarakatan. Baginya kondisi ini terkesan pembiaran atau bahkan kesengajaan.

“Kok bisa seorang narapidana bisa mengatur peredaran sabu dari penjara, masih bisa jadi bandar padahal sedang menunggu vonis mati. Bagi saya ini terkesan pembiaran atau kesengajaan,” kata politisi Fraksi Partai Golkar ini dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/1/15).



Anggota Komisi III DPR Wenny Haryanto

Ia juga meminta kepada Kepala BNN mengungkap informasi, apa yang terjadi sebenarnya di balik jeruji ketika para terpidana hukuman mati ini menanti masa eksekusinya bahkan ada yang sampai belasan tahun. Wakil rakyat dari dapil Jabar VI ini juga menekankan dalam kondisi bangsa menghadapi darurat narkoba, BNN patut melakukan langkah luar biasa untuk menunjukkan kondisi ini memang kritis.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding bahkan tegas meminta pertanggungjawaban BNN yang sejak tahun 2011 telah men-



gumumkan tahun 2015 sebagai tahun Indonesia Bebas Narkoba. “Ternyata dalam forum rapat ini Kepala BNN mengatakan tahun ini masih darurat narkoba. Anggaran BNN cukup besar ternyata tidak ada manfaatnya,” tandasnya.

Ia meminta BNN menjelaskan mengapa target Indonesia Bebas Narkoba sesuai Inpres no.12/2011 tidak

dapat terwujud. Sudah sepatutnya hal ini menjadi evaluasi dari Komisi III, jangan sampai uang rakyat yang telah dikururkan tidak ada hasilnya.

Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar menjelaskan bisnis narkoba adalah peredaran gelap yang merupakan rantai antara *supply* dan *demand*. Ia mengakui menemukan sejumlah kasus ada bandar narkoba yang mengengen-

dalikan jaringan bisnisnya dari dalam penjara.

“Oleh karena itu peralatan komunikasi dalam Lapas harus dilarang. Iya ada peran petugas Lapas tetapi saya bisa buktikan hanya perkasus bukan general. Sipir ini ada yang bermasalah sehingga akhirnya ada yang dipecat, sekali lagi ini kasuistis,” kata dia. (iky)

foto: rizka/parle/hr

## BKSAP Sambut Baik Peningkatan Kerjasama Arab-Indonesia

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyambut baik dan akan mendalami keinginan delegasi Majelis Syuro Parlemen Arab Saudi yang ingin meningkatkan hubungan dengan Indonesia terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan.

“Kami sangat menyambut baik keinginan yang disampaikan delegasi Majelis Syuro Parlemen Arab Saudi untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Indonesia terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan atau militer. Karena sebagaimana dikatakannya mereka menilai alutsista (alat utama sistem persenjataan) Indonesia saat ini sangat berkembang jauh. Namun bentuk kerjasama seperti apa yang diinginkan Arab kami juga belum tahu. Insya Allah besok kami akan mendalami lebih jauh dalam pertemuan yang lebih intens lagi dengan delegasi Arab,” papar Nurhayati usai menerima delegasi Majelis Syuro Parlemen Arab Saudi di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta (2/2).

Ditambahkan Nurhayati, tidak hanya dalam bidang pertahanan dan kemiliteran saja yang akan didalami dalam pertemuan selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa banyak bidang kerjasama yang dapat lebih ditingkatkan. Diantaranya bidang pertanian dan perekonomian, karena sebagaimana diketahui Indonesia dan Arab Saudi sama-sama masuk dalam kelompok G20.

Pada kesempatan itu, Ketua delegasi Majelis Syuro Parlemen Arab Saudi, Abdul Rahman Bin Ahmed Haeijan mengungkapkan keinginannya untuk belajar tentang keparlemenan dari DPR RI. Mengingat saat ini, Arab Saudi juga memiliki 30 perempuan yang menjadi anggota parlemennya. Padahal sebelumnya dikatakan, negaranya memandang sebelah mata kaum wanita yang ingin masuk dalam dunia politik.

“Kondisi tersebut kurang lebih sama dengan yang terjadi di Indonesia. Bedanya, di Indonesia menetapkan jumlah wanita yang masuk ke parle-



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

men berdasarkan Undang-undang Pemilu, dimana wanita diberikan jatah kursi 30 persen dari keseluruhan anggota DPR yang ada. Sementara di Arab Saudi jumlahnya 30 orang atau bukan mengacu pada prosentase,” ungkap anggota Komisi I DPR ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang ikut menerima kunjungan Majelis Syuro Parlemen Arab mengatakan bahwa saat ini dimana kedua negara baik Indonesia maupun Arab sama-sama memiliki pemimpin baru yang masih fresh. Hal ini menjadi momentum yang tepat bagi kedua Negara untuk lebih meningkatkan hubungan yang sudah terjalin dengan baik. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

## Terkait BBM Subsidi, DPR Panggil Kembali Menteri ESDM

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi (Fraksi Nasdem) meminta Pemerintah menjelaskan perhitungan secara akurat berapa besaran subsidi sebenarnya yang gelontorkan oleh pemerintah.

“Karena itu perlu publikasi perhitungan *Mean of Plats Singapore* (MOPS) kepada Dewan agar perhitungan BBM baik subsidi maupun non subsidi men-

jadi jelas,” ujarnya kepada wartawan, sesuai Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, di Gedung Nusantara I, Senin, (2/2).

Dia mengharapkan, pemerintah dapat segera memberikan penjelasannya esok hari dengan data yang lebih

akurat. “Jadi besaran subsidi semua tergantung kepada pemerintah, dan tergantung berapa besar perbedaan MOPSNya,” jelasnya.

Dia mengatakan, untuk kasus premium dalam laporannya ada dua kali penghitungan seperti margin dan biaya distribusi yang perlu diperjelas,

“kita menginginkan klarifikasi biaya distribusi yang mana dihitung dua kali ini juga bisa berdampak rendahnya biaya perolehan dan harga jual sekarang ini,” katanya.

Untuk premium, lanjutnya, boleh jadi harga perolehan dan plus lainnya bisa lebih rendah jika dihitung secara

akurat. “Jadi terkesan ada semacam keuntungan yang diberikan Pemerintah kepada Pertamina, ini kita bisa saja sepakat keuntungan ini diberikan kepada Pemerintah artinya semacam ada margin yang diberikan,” ungkapnya. (Si), foto : andri/parle/hr.

## Anggota DPR Harapkan Amanat UU Desa Bisa Dipenuhi



Anggota Komisi XI DPR Haerul Saleh

Komisi XI DPR merekomendasikan agar tahun depan Undang-Undang Desa harus sudah dipenuhi dengan memberikan 10 persen transfer ke daerah. “Bagaimanapun juga pemerintah harus bisa memenuhi harapan masyarakat desa. Kami akan memperjuangkan alokasi dana desa tahun ini yang dianggarkan pemerintah dalam RABPN-P 2015 sebesar Rp.20 triliun untuk bisa ditingkatkan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa.” kata anggota Komisi XI DPR Haerul Saleh, saat kunjungan kerja spesifik ke NTB, Jumat (30/1) lalu.

Anggota Dewan asal Dapil Sulawesi Tenggara ini merasa prihatin dengan belum terealisasi dana desa dari transfer daerah, “Sebagaimana diketahui

bahwa proses pembentukan UU Desa telah memakan waktu selama 7 tahun, melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemerintah dan DPR serta menghabiskan energi yang tidak sedikit begitupun dana yang dikeluarkan oleh negara. Tetapi ketika Rancangan UU Desa ini disahkan menjadi Undang-undang, pemerintah tidak melaksanakan amanah undang-undang ini,” ungkap Haerul.

Menurut Haerul, dana desa dalam APBN di tahun 2015 sebesar Rp.9 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 20 triliun pada RAPBN-P 2015, berarti ada peningkatan Rp.11 triliun, namun tetap saja belum memenuhi amanah konstitusi dan janji Presiden Jokowi pada saat kampanye Pilpres.

Idealnya RAPBN-P yang diajukan pemerintah ini harus bersinergi dengan visi-misi Presiden Jokowi pada saat kampanye. Seharusnya dalam RAPBN-P yang diajukan lebih fokus pada program yang langsung menyentuh kepada masyarakat terbawah yakni masyarakat desa.

Seperti diketahui bahwa dalam RAPBN-P yang diajukan banyak anggaran yang belum jelas digelontorkan untuk apa, bisa kita ambil contoh misalnya alokasi PMN kepada BUMN yang luar biasa besar persentase yang akan disalurkan, tetapi dalam rapat

kerja dengan Menteri Keuangan tidak mengurai secara jelas apa, untuk apa, dan impact terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Seharusnya alokasi anggaran itu di prioritaskan pada program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat desa, apalagi alokasi dana desa merupakan hal nyata dan jelas tercantum dan merupakan amanah konstitusi. Pengabaian pemerintah akan hal ini memberi kesan pengingkaran konstitusi yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini pengingkaran terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra dengan tegas akan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa bahwa alokasi dana desa yang akan disalurkan pemerintah melalui pembahasan APBN-P 2015 ini harus sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang juga tak kalah penting merupakan visi dan misi Presiden Jokowi pada saat kampanye bisa terwujud. Yakni setiap desa mendapat bantuan alokasi dana desa sebesar 1,4 Miliar. ADD ini juga merupakan harapan besar masyarakat desa khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara yang kami himpun pada saat reses,” tutup Haerul Saleh. (spy), foto : supriyanto/parle/hr.

## Program KUR Akan Dihidupkan Kembali

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini dihentikan dari program perbankan akan dihidupkan

kembali. Karena itu Komisi XI DPR ingin melakukan pengawasan terhadap program KUR tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR ke Propinsi Nusa Tenggara (NTB) H. Gus Irawan Pasaribu, pada saat pertemuan dengan Otorita Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi NTB Jumat (30/1) sore.

Gus Irawan mengatakan, terkait dengan perhatian usaha mikro kecil

di sektor usaha sangat besar, maka tahun ini DPR kembali mengusulkan agar KUR yang dulu pernah ada sebisa mungkin untuk dihidupkan kembali, dan DPR sudah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5 triliun untuk dikelola oleh perbankan.

“Komisi XI DPR sangat besar perhatiannya terhadap usaha mikro kecil ini, sehingga minta persiapan perbankan untuk mengelola anggaran ini”, kata Gus Irawan.

Kunjungannya ke NTB ini adalah dalam rangka untuk bertemu dengan lembaga pengawas keuangan bersama pihak-pihak perbankan. Hal ini dilakukan karena dari pemerintah pusat dan Komisi XI DPR telah mendapat kesepakatan terhadap asumsi makro untuk APBN-P (Anggaran Pendapatan

Belanja Negara Perubahan) tahun 2015.

Politisi Partai Gerindra ini menambatkan, hasil kesepakatan di pusat, ditetapkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Untuk inflasi sebesar 5 persen, kurs sebesar Rp.12.500 dan suku bunga SBN sebesar 62 persen per tiga bulan. Ini merupakan angka nasional. “ Kami datang untuk mendapatkan masukan dari perbankan dan meyakinkan kontribusi NTB dalam mencapai asumsi makro ini,” tegas Gus Irawan.

Tujuan lain lanjutnya, Komisi XI DPR sudah sepakat untuk membuat indikator pembangunan agar bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya untuk tahun 2015 ditargetkan pembangunan atau indeks gini rasio sebesar 0,40



Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR ke Provinsi NTB H. Gus Irawan Pasaribu

persen, penurunan angka kemiskinan sebesar 10,3 persen, penurunan angka pengangguran sebesar 5,6 persen dan pembangunan IPM sebesar 69,4 persen dengan system perhitungan yang baru. (Spy), foto : supriyanto/parle/hr.

## Komisi X DPR Apresiasi Kesiapan Jateng Hadapi UN



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR

Komisi X DPR RI mengapresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan koordinasi seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mensosialisasikan Prosedur Operasional Stantar (POS) Ujian Nasional (UN) yang belum diterbitkan oleh Pemerintah.

“Cukup bagus dan lancar. Prestasi yang ditunjukkan Jawa Tengah ini cukup bagus, itu harus dipertahankan, kami melihat tadi semuanya sudah siap,” kata Wakil Ketua Komisi X M. Ridwan Hisjam, saat memimpin Kunjungan Spesifik terkait kesiapan pelaksanaan UN, Jum’at (30/1), di Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Ridwan, selaku Pimpinan Komisi X yang membidangi Pendidikan mengharapkan agar POS segera diterbitkan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden, karena pelaksa-

naan UN yang direncanakan pada bulan April. Perlunya Peraturan Pemerintah agar agenda-agenda atau jadwal yang sudah ditetapkan tidak bergeser, karena kalau bergeser yang menjadi korban adalah anak didik.

“Mereka tidak mengerti bahwa ada masa transisi, birokrasi yang ada ini jangan sampai menghambat jadwal yang sudah ada. Bukan saat pelaksanaannya tetapi prosesnya yang terpenting, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Contohnya memutuskan tentang materi, pelaksana percetakan dan distribusi,” jelasnya.

Terkait pelaksana percetakan, dia menerangkan bahwa Komisi X minta Menteri Pendidikan agar terjadi distribusi ekonomi kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang ada di daerah agar diperhatikan. Hal itu juga akan berdampak pada distribusi barang yang dihasilkan oleh percetakan.

“Pusat cukup menentukan materinya, tapi pelaksana percetakan dan distribusi serahkan kepada daerah, karena pelaksanaannya yang lalu terdapat permasalahan salah kirim,” ungkap Ridwan.

UN menjadi program nasional tiap tahun yang dilaksanakan, Ridwan minta kepada Kementerian agar mendorong Pemerintah Daerah supaya pengusaha yang ada di daerah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses mencetak soal UN. Namun hal ini juga harus diawasi agar terjamin kerahasiaan soal UN.

“Prosesnya di pusat dan pelaksanaannya di daerah. Tender dilakukan oleh pusat tetapi pelaksanaan percetakan dan distribusi dilaksanakan oleh daerah,” ungkap Ridwan. (as), foto : agung sulistiono/parle/hr.



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meresmikan Parkiran Motor DPR RI, Jumat (06/02) Foto: Andri/Parle



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf didampingi anggota BKSAP membahas persiapan International Woman Day dengan para Dubes perempuan yang ada di Indonesia, Jumat (06/02) Foto: Andri/Parle



Pimpinan Komisi VI DPR RI menggelar Rapat dengan Menteri Negara BUMN Rini Soemarno membahas Program PNM untuk BUMN, Kamis (05/02) Foto: Naefurodji/Parle